

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP ISLAMIC
HUMAN DEVELOPMENT INDEX KABUPATEN KOTA PROVINSI NTB**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR

MAGISTER EKONOMI SYARIAH

OLEH:

AINUL GABI

22208011001

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP ISLAMIC
HUMAN DEVELOPMENT INDEX KABUPATEN KOTA PROVINSI NTB**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

OLEH :

AINUL GABI

NIM. 22208011001

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1039/Un.02/DEB/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX KABUPATEN KOTA PROVINSI NTB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUL GABI, S.E
Nomor Induk Mahasiswa : 22208011001
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 66a09b17e816



Penguji I
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a06ec13dfff



Penguji II
Dr. Miftakhl Choiri, S.Sos.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66a076000244b



Yogyakarta, 19 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a1a9b6d3d3d

HALAMAN PESERTUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ainul Gabi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ainul Gabi

NIM : 22208011001

Judul Tesis : “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (IHDI) Kabupaten Kota Provinsi NTB”

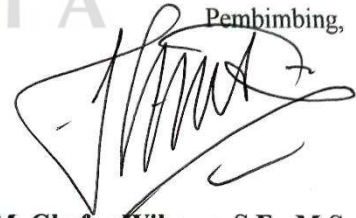
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut dapat segera dimonaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta 5 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. M. Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc

NIP. 198003142003121003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Gabi

NIM : 22208011001

Jurusan : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (IHDI) Kabupaten Kota Provinsi NTB” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta 5 Juli 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang membuat,



Ainul Gabi

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, saya yang bertanda tangan di
bahwa ini:

Nama : Ainul Gabi
NIM : 22208011001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-
exclucive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human
Development Index (IHDI) Kabupaten Kota Provinsi NTB”**

Beserta peringkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalih
media/formatkan, mengolah, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 5 Juli 2024



(Ainul Gabi)

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis

maka selalu tanamkan dirimu agar terus belajar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa cinta yang sangat besar tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan segalanya terhadap saya, serta kepada Almater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah begitu banyak menginvestasikan ilmunya terhadap saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dengan huruf Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 bertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ḥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	eṣ (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	ḏe (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di matikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan ‘h’.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*.

القرآن	<i>al-Qur'an</i>
--------	------------------

القياس	<i>al-qiyās</i>
--------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia, inayah serta hidayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap *Islamic Human Development Index (I-Hdi)* Kabupaten Dan Kota Di Provinsi NTB”**. shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada banginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kabar gembira, sehingga menjadikannya sebagai suri tauladan setiap insan manusia khususnya yang beragama Islam agar mendapatkan syafaat dari Allah Swt di hari kiamat.

Dalam penyusunan tesis ini begitu banyak tokoh yang memiliki peran penting baik yang membantu secara langsung dan secara tidak langsung melalui doa-doa yang dilangitkan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalija Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.A, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc, sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafiq Mahmada Hanafi, M.Ag, sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc, selaku pembimbing tesis yang senantiasa meluangkan waktu guna memberi bimbingan yang

sangat responsif serta mmberi saran dan arahan agar menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku penguji I (satu) tesis penelitian
7. Bapak Dr. Miftahul Choiri, S.Sos.I., M.S.I Selaku penguji II (dua) tesis penelitian
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membimbing selama proses perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Magister Ekonomi Syariah Kelas A, B dan kelas C terkhus teman-teman kelas A yang banyak sekali bertukar pikiran serta bantuan selam proses studi.
10. Orang tua, Fatahudin dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa mendoakan dan selalu mensupport cita-cita saya.
11. Mita Ratna Dila S.Hum., M.Pd, selaku calon teman hidup yang telah sabar menanti dari program sarjana sampai pada sekarang ini.
12. Adik-adik saya Anam Gafir, Aslan Gafar dan Al Gifari yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya sampai sekarang ini
13. Seluruh teman-teman Hikmad-Yogyakarta, adik-adik O,o Mantika-Yogyakarta dan Asrama Dompu Yogyakarta

Dari nama-nama yang disebutkan serta yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap menjalani aktivitasnya semoga segala sumbangsi dan doanya di balas oleh Allah swt.

Wasalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta 5 juli 2024

Penyusun,



(Ainul Gabi)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PESERTUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Ekonomi Pembangunan Islam	19
2. Human Development	20
3. Islamic Human Development Index	21
4. Konsep Perhitungan I-HDI (Islamic Human Development Index).....	26
5. Fungsi Kesehatan	26
6. Pendidikan	27
7. Perumahan Dan Fasilitas Umum	29

8. Perlindungan Sosial.....	29
B. Kajian Pustaka	31
C. Kerangka Teoritik Dan Pengembangan Hipotesis.....	36
BAB III.....	44
METODELOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Variabel dan Definisi Operasional Varibel Penelitian	44
C. Populasi Dan Sampel	52
D. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	54
1. Metode Estimasi Regresi Data Panel	55
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	57
3. Uji Asumsi Klasik	60
4. Uji Hipotesis.....	61
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	65
B. Analisis Statistik Deskriptif.....	74
C. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	76
1. Metode Common Effect Model.....	76
2. Metode Fixed Effect Model.....	77
3. Metode Model Random Effect	77
4. Uji Chow	78
5. Uji Hausmant.....	79
6. Uji Asumsi Klasik	80
7. Uji Hipotesis.....	81
D. Pembahasan	86
BAB V.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Implikasi Penelitian	96
C. Keterbatasan Penelitian	97

D. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99



DAFTAR TABEL

Tabe 1. 1 Index Pembangunan Manusia Di Provinsi Ntb Periode 2018-2022.....	4
Tabel 1.2 Islamic Human Development Index.....	9
Tabel 3. 1 Tabel Indikator Ihdi	45
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	53
Tabel 4. 1 Islamic Human Development Index (I-HDI)	66
Tabel 4. 2 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan	67
Tabel 4. 3 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan	79
Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perumahan Fasilitas Umum.....	73
Tabel 4. 5 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial 2018-2022.....	73
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif.....	74
Tabel 4. 7 Hasil Uji CEM.....	76
Tabel 4. 8 Hasil Uji FEM	77
Tabel 4. 9 Hasil Uji REM.....	78
Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow.....	79
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hausmant	79
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas.....	80
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heterokedaksitas.....	81
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Index Pembangunan Manusia Di 10 Propinsi di Indonesia	3
Gambar 1. 2 Pengeluaran Pemerintah Lima Fungsi.....	10
Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pikir.....	43



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna memastikan dampak belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam di Kabupaten, Kota, Provinsi NTB selama periode lima tahun, khususnya dari 2018 hingga 2022. Studi ini akan menggunakan fasilitas umum, pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, pengeluaran pemerintah untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel independen, dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IHDI) sebagai variabel dependen. Regresi data panel digunakan sebagai teknik. Data panel adalah campuran data cross-sectional dan time series. Ketika regresi data panel digunakan, Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang baik untuk digunakan untuk estimasi akhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari 2018 hingga 2022, pengeluaran pemerintah untuk perumahan, fasilitas umum, dan perlindungan sosial bersama-sama memiliki dampak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia Islam (IHDI) di Kabupaten Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan saja tidak. Variabel dependen dipengaruhi oleh temuan investigasi variabel independen pada saat yang sama. 75% dari temuan penelitian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak diperiksa, dan 25% ditentukan oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci: Islamic Human Development Index, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACK

This study aims to ascertain the impact of government spending on the Islamic Human Development Index in Regencies, Cities, and Provinces of NTB over a five-year period, especially from 2018 to 2022. The study will use public facilities, government spending on social protection, government spending on housing, education, and health as independent variables, and the Islamic Human Development Index (IHDI) as dependent variables. Panel data regression is used as a technique. The data panel is a mixture of cross-sectional and time series data. When panel data regression is used, the Fixed Effect Model (FEM) is a good model to use for final estimation. The findings of the study show that, from 2018 to 2022, government spending on housing, public facilities, and social protection together had a significant impact on the Islamic Human Development Index (IHDI) in Kota Regency, West Nusa Tenggara Province, but government spending on health and education functions alone did not. The dependent variable is influenced by the findings of the independent variable investigation at the same time. 75% of the study's findings were determined by unexamined factors, and 25% were determined by other factors

Keywords: *Islamic Human Development Index, Health, Education, Housing, Public Facilities, Social Protection.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa adalah pembangunan manusianya, dan Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Bangsa ini dianggap maju tidak hanya dalam hal PDB tetapi juga dalam hal harapan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan layanan publik yang diberikan kepada warganya (Kahang et al., 2016).

Masyarakat yang adil dan makmur adalah salah satu tujuan yang diakui oleh pemerintah Indonesia sebagian besar dicapai melalui pembangunan nasional. Pembangunan daerah dengan demikian telah menjadi fokus dari sejumlah proyek pembangunan, terutama di daerah-daerah di mana tingkat kemiskinan relatif tinggi dan telah meningkat setiap tahun. Sejalan dengan tujuan pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang telah menentukan kemajuan negara, serta prioritas masing-masing kebutuhan di suatu wilayah, pendekatan terpadu digunakan dalam pembangunan daerah dan berkelanjutan. Sehingga, tingkat di mana jumlah orang miskin menurun berfungsi sebagai salah satu indeks utama efektivitas pembangunan nasional. Agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan dana di suatu negara atau wilayah, mereka harus efektif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (Susilowati & Suliswanto, 2015).

Pemain kunci dalam ekspansi dan pengembangan ekonomi adalah pemerintah daerah. Diantisipasi bahwa pemerintah daerah akan dapat

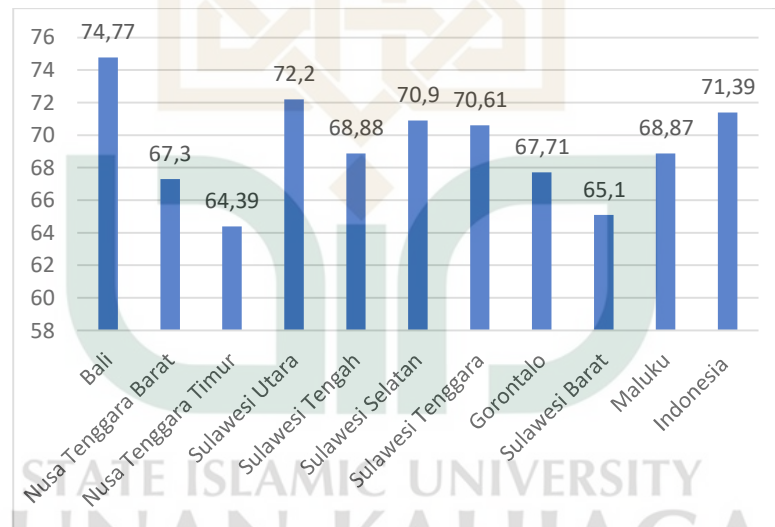
secara positif sebagaimana ditentukan oleh produk regional bruto (PDB), mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi, termasuk pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah diharapkan memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan indeks pembangunan manusia, untuk kepentingan mempromosikan pembangunan ekonomi. Sejumlah kelompok ekonomi Keynesian berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong pemulihan ekonomi di daerah-daerah di mana sektor publik dan swasta terlibat. Sehingga, permintaan agregat yang diciptakan oleh pengeluaran pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam beberapa kegiatan dapat menghasilkan pengganda ekonomi. Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan kontribusi, salah satunya mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja sesuai dengan fungsi yang sesuai (Arfiyansyah, 2018).

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah bertindak sebagai pelaksana pembangunan tentu membutuhkan personel terbaik. Untuk itu, perlu diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah. Tujuan pengeluaran dan investasi pemerintah adalah pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diadopsi pemerintah. Sebagaimana dibuktikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah ditekankan di sini untuk meningkatkan kaliber sumber daya manusia, juga digunakan untuk mendanai sektor publik, yang lebih signifikan. Tingkat kesehatan,

pendidikan, dan pelayanan publik warga individu merupakan faktor kunci yang harus diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Populasi dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi lebih mampu menyerap dan mengelola sumber daya untuk pembangunan ekonomi, baik dari segi teknologi maupun institusi. Hal ini penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum rakyat, yang pada dasarnya ditentukan oleh kegiatan. (Baeti, 2013).

Gambar 1. 1

Index Pembangunan Manusia Di 10 Provinsi di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1 di atas menampilkan IPM di 10 provinsi di Indonesia 2018 melebihi nilai rata-rata index pembangunan manusia secara nasional, Bali memiliki nilai tertinggi sebesar 74,77, Nusa Tenggara Barat 67,30, Nusa Tenggara Timur 64,39, Sulawesi Utara 72,20, Sulawesi Tengah 68,88 Sulawesi Selatan 70,90, Sulawesi Tenggara 70,61, Gorontalo 67,71, Sulawesi Barat 65,10, Maluku 68,87, Indonesia 71,39.

Nilai tersebut di bawah rata-rata nilai index pembangunan manusia nasional perubahan positif IPM Provinsi di Indonesia pada setiap tahunnya mampu mempengaruhi perubahan index pembangunan manusia pada setiap provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan gambar di atas menunjukkan jika pembangunan antar daerah di Indonesia mendapati ketimpangan atau kesenjangan antar Provinsinya.

Tab 1. 1

Index Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Periode 2018-2022.

Tahun	Index Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB
2018	67,30
2019	68,14
2020	68,25
2021	68,65
2022	69,46

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023)

Gambar 1.2 menunjukkan IPM di NTB 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi pada awal tahun 2018 index pembangunan manusia di Provinsi NTB berada pada angka 67,30 selanjutnya dari tahun 2019 merupakan indeks pembangunan manusia terendah 5 tahun terakhir dan di tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang konsisten menjadi 69,46. Index pembangunan manusia di Provinsi NTB.

Penjelasan Haji Babaei dan Ahmadi (2018), Jika pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari PDB tetap di bawah ambang batas, IPM akan meningkat seiring dengan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Ketika pengeluaran publik sebagai proporsi PDB melebihi ambang batas, aturan IPM menurun. Temuannya menampakkan jika pemerintah harus mempertimbangkan untuk memotong pengeluaran karena ada situasi dimana pengeluaran pemerintah melampaui apa yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam beberapa keadaan, kesejahteraan masyarakat tidak akan menderita sebagai akibat dari penurunan alokasi anggaran. Pemerintah perlu memprioritaskan seberapa baik pengeluarannya meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat daripada berapa banyak uang yang dihabiskan untuk mereka (Mongan, 2019).

IPM populasi yang jelek akan mempunyai efek ke produktivitas tenaga kerja yang sedikit. Oleh karena itu, pendapatan yang rendah adalah penyebab tingginya angka kemiskinan. Selain itu, karena tenaga kerja adalah aset utama bagi orang miskin, investasi akan lebih signifikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau akan secara signifikan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dan investasi di bidang pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di suatu daerah ataupun negara (Riana & Khafid, 2022).

Selain berkonsentrasi pada distribusi pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan, Kondisi sosial ekonomi telah ditetapkan oleh Islam, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan. Syariah Maqhashid memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan dalam Islam. Islam membagi kebutuhan dasar manusia menjadi lima kategori: kekayaan, pendidikan, agama, kesehatan fisik, dan keturunan (Auda, 2019). Tujuan utama Islam adalah untuk memenuhi persyaratan ini karena setiap orang memiliki potensi untuk memiliki kehidupan yang produktif. Meningkatkan kesejahteraan atau tingkat kehidupan yang bermanfaat adalah tujuan kesejahteraan (masalih). Oleh karena itu, akan dianggap miskin jika salah satu dari tuntutan ini tidak dipenuhi (Faisol, 2017).

Sebagai alat ukur berbasis peringkat yang terkenal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP. Pencapaian kesejahteraan material dan sosial masih menjadi fokus indikator IPM. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan manusia ditentukan oleh prestasi duniawi dan surgawi; akibatnya, indikator pembangunan ekonomi tradisional, seperti Indeks Pembangunan Manusia, dianulir taidak cukup kompatibel mengukur kesejahteraan manusia, khususnya di negara Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa agama tidak diperhitungkan sebagai indikator saat mengukurnya. Fakta ini berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan model baru yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan

Islamic-Human Development Index atau I-HDI, atau I-IPM, yang mengukur kesejahteraan manusia dari perspektif Islam (Tiara, 2018).

Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang diusung secara konvensional sungguh sangat jauh dari tujuan dan cita-cita yang ingin diraih dalam Islam yaitu *Maqosid Syari'ah*, yang bermuara pada tujuan *Maslahah*. Keberhasilan pembangunan hanya dinilai dari aspek fisik dan pencapaian materi saja sebagai standar kesejahteraan dan mengesampingkan aspek mental dan spiritual di dalamnya. Sementara ajaran Islam adalah ajaran yang mengatur semua sendi kehidupan, dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul, termasuk juga persoalan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam itu “salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk semua jaman dan tempat.) walaupun wahyu sudah turun lebih 14 abad yang lalu semenjak wafatnya Rasulullah, dalam hal ini *maqhasid syariah* sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan itu (Al Awwa, 2006).

Konsep pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam sesungguhnya jadi alternatif untuk merumuskan kembali arti terhadap nilai pembangunan manusia seperti yang yang dijelaskan dalam pernyataan ini. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi adalah sangat unik serta khas dan sangat berbeda dengan pandangan konvensional, khususnya pada pokok yang yang sangat dasar. Tujuan pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam adalah untuk mencapai

kesejahteraan menyeluruh baik dunia dan akhirat dan disebut dengan *falāh* (Hendri Anto MB, 2010).

Indeks pertumbuhan manusia yang konsisten dengan keyakinan Islam dan cocok untuk digunakan di negara-negara Muslim dan non-Muslim pada dasarnya telah dikembangkan karena HDI dianggap tidak mampu mengarahkan agama pada pandangan etis pembangunan ekonomi-sosial di negara Muslim. Anto (2011) awalnya mempresentasikan IHDI, yang ditentukan oleh metrik yang mewakili lima rukun dasar *maqashid syariah* (Asep Nurhalim et al., 2022).

Konsepsi Islam tentang perkembangan manusia didasarkan pada *maqosid syariah* dan dimensi material dan moral ditekankan. Dua persyaratan manusia yang penting diakui oleh Islam: awal, keduniawian, atau keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang material dan terlibat dalam produksi maksimum. Para cendekiawan Islam, Terkhusus Al-Ghazali dan Al-Syatibi, telah menguraikan penerapan *maqohsid syariah* untuk mengukur perkembangan manusia. Mereka merangkum lima tahap umat manusia, atau *al-kulliyah al-khamsah*, ialah: melestarikan agama (*hifl al-din*), melindungi jiwa (*hifl al-nafs*), melestarikan kecerdasan (*hifl al-aql*), melindungi keturunan (*hifl al-nasl*), dan melestarikan kekayaan (*hifl al-mal*) (Rukiah et al., 2019).

Berbagai aspek mendasar dari kualitas hidup digunakan oleh Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia. Lima dimensi digunakan untuk menghitung (I-

HDI) diantaranya *Hifdz dien* dengan indikator angka kriminalitas, *Hifdz nafs* dengan indikator angka harapan hidup, *Hifdz aqal* dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, *Hifdz nasl* dengan indikator laju pertumbuhan penduduk dan *Hifdz maal* dengan indikator pengeluaran perkapita dan indeks kendalaman kemiskinan

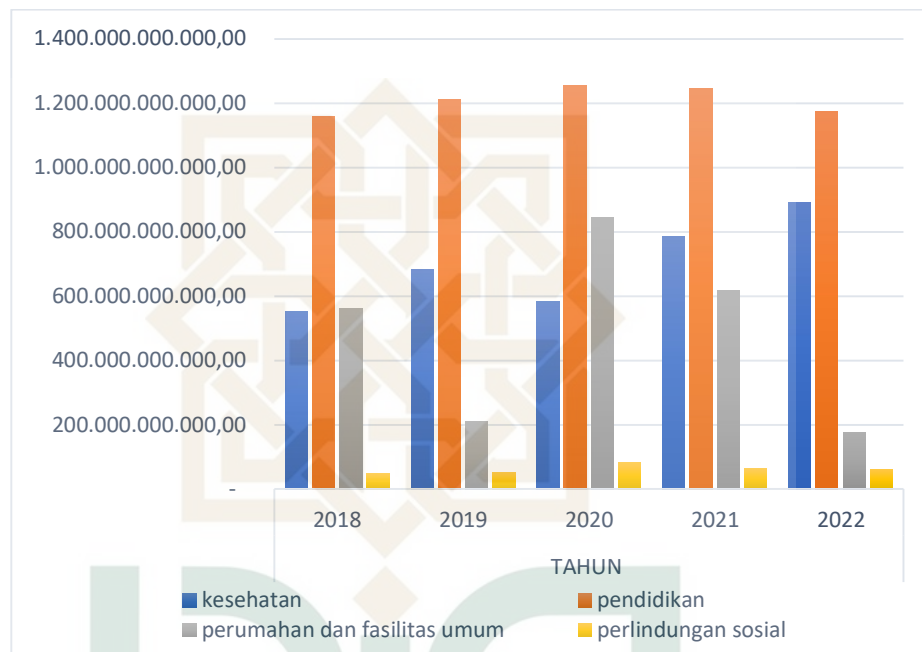
Tabel 1.2
I-HDI Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2020

NO	KABUPATEN KOTA	2018	2019	2020
1	Kota Mataram	85,6	84,6	67,4
2	Kota Bima	43,4	51,8	33,56
3	Kabupaten Bima	41,6	37,4	41,2
4	Dompu	72,7	62,4	52
5	Lombok Lombok Barat	69,4	60,4	58,6
6	Lombok Tengah	76,8	52,2	71,6
7	Lombok Timur	79,8	86,6	42,44
8	Lombok Utara	36,8	36,6	38,8
9	Sumbawa	75,8	63	59
10	Sumbawa Barat	53	51,2	35,4

Sumber : *Data Diolah Dilapangan, 2024*

Berdasarkan pada Tabel 1.2 menampakkan I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB mengalami fluktuasi, nilai I-HDI tertinggi yaitu ada pada kota Mataram, dan I-HDI terendah ada pada Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima

Gambar 1. 2
Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, Pendidikan
Perumahan Fasilitas Umum dan Perlindungan sosial
Provinsi NTB Tahun 2018-2022



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Di Olah, 2024

Berdasarkan pada Gambar Grafik 1.3 pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perumahan fasilitas umum dan perlindungan sosial pada tahun 2022 di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada tahun 2020 mengalami penurunan, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan pada tahun 2022 mengalami penurunan dan untuk tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2020 sangat tinggi sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan untuk pengeluaran pemerintah dalam sektor perlindungan sosial di tahun

2020 mengalami peningkatan, dan di tahun 2021-2022 mengalami penurunan untuk anggaran pemerintah dalam sektor perlindungan sosial.

Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal: pengeluaran. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan anggarannya dengan sebaik mungkin untuk melakukan subsidi, misalnya area pendidikan dan kesehatan. Belanja pemerintah yang ditargetkan akan mampu meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya HDI juga akan meningkat (Wibowo, 2019).

Kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan meningkatkan IPM adalah meningkatkan belanja pemerintah demi area Pendidikan dan Kesehatan. Investasi pemerintah pada divisi kesehatan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang meningkatkan IPM dan unsur-unsur penyusunnya, terutama harapan hidup. Kemampuan seseorang untuk melanjutkan pendidikan tinggi dapat dibantu oleh kesehatan mereka, dan mereka yang berada dalam kesehatan yang baik juga dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produktivitas di tempat kerja. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan menghabiskan lebih banyak untuk konsumsi (Fajrin & Erisniwati, 2021).

IPM dan komponennya, khususnya pendidikan, secara signifikan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini terutama berlaku untuk peningkatan indikator rata-rata panjang sekolah

dan harapan panjang sekolah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pemahaman publik tentang nilai menjaga kesehatan, yang memperpanjang harapan hidup (Wardhana, 2020). Pengetahuan dan kemampuan masyarakat tumbuh seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, yang meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Tingkat produksi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat (Masili Lumanauw, 2022).

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan di Indonesia, studi yang diterapkan oleh World Bank dan PROSPERA menyoroti beberapa problematika yang berkontribusi terhadap buruknya standar pendidikan di Indonesia. Temuan World Bank menunjukkan bahwa terdapat empat aspek masalah pendidikan di Indonesia diantaranya terutama ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dan lokal, kaliber guru yang buruk, kurangnya akuntabilitas, dan pemantauan evaluasi yang masih di bawah standar. Sementara itu, hasil PROSPERA menekankan pada sekolah kejuruan, pengeluaran pemerintah daerah, kualitas guru, dan kinerja. Pertama dan terpenting, ada dua masalah utama: kualitas guru yang rendah dan perbedaan regional dalam kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Dengan begitu akan membuka pintu yang lebih lebar pada akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan selanjutnya

berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia (Fahmi, 2018).

Penanganan alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan tersebut pemerintah memerlukan koordinasi yang baik dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan Variabel yang Mempengaruhi belanja Pemerintah pada area Pendidikan dan kesehatan. untuk menguji upaya pemerintah pada realisasi anggaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Sejumlah penelitian juga menentukan Hubungan Antara Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Belanja Pemerintah. Salah satu studi tersebut menjelaskan bagaimana, ketika menerapkan pendekatan Bank Pembangunan Asia (ADB), indeks inklusif semua provinsi di Indonesia kecuali Papua telah menghasilkan hasil yang memuaskan. Rendahnya tingkat inklusi di Provinsi Papua Barat dan Papua jika dibandingkan dengan provinsi lain adalah hasil dari penggunaan teknik *World Economic Forum (WEF)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)* (Sitorus, A & Arsani, 2018). Penelitian tambahan menunjukkan bahwa indeks pertumbuhan inklusif dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran regional dan karakteristik terkait kesehatan, dan dipengaruhi secara negatif oleh hal-hal seperti pengangguran, tingkat kemiskinan, dan pencapaian pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan IPM dan komponennya, khususnya harapan hidup, Jumlah dan kualitas kesehatan masyarakat dikembangkan

sebagian oleh belanja pemerintah di area kesehatan. Sementara berada dalam kesehatan yang baik dapat memudahkan seseorang untuk melanjutkan pendidikan tinggi, berada dalam kesehatan yang lebih baik juga dapat membuat seseorang lebih produktif di tempat kerja, yang dapat menyebabkan kenaikan gaji. Pengeluaran konsumsi masyarakat akan meningkat dengan pendapatan tinggi (Fajrin & Erisniwati, 2021).

Bersama dengan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan nasional. UUD 1945 mendikte tujuan bangsa Indonesia untuk sistem jaminan sosial, yang berfungsi sebagai landasan konstitusi Negara. Edi Suharto (2008) Setiap program yang dilaksanakan oleh sektor publik, komersial, maupun masyarakat guna mencapai transfer pendapatan atau konsumsi kepada orang susah, mengawal populasi rentan dari ancaman terhadap mata pencaharian mereka, dan meningkatkan status sosial kelompok terpinggirkan disebut sebagai perlindungan sosial (Iping, B. 2020).

Penelitian Alya dkk, (2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sementara pendapatan per kapita dan sektor kesehatan memiliki sedikit pengaruh pada IPM, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak menguntungkan parsial pada ukuran tersebut. Di Provinsi NTB, belanja pada area pendidikan, Kesehatan dan pendapatan per kapita semuanya berdampak positif terhadap IPM pada saat yang bersamaan.

Penelitian Dalimunthe & Imsar, (2023), Meskipun I-HDI Indonesia saat ini relatif rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal itu telah meningkat setiap tahun. I-HDI dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran pemerintah dan berdampak negatif terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sesuai untuk pengukuran I-HDI.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan diatas dalam rangka menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian bertema ***Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) Kabupaten Kota Di Provinsi NTB***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022?
2. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan Berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022?
3. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022?
4. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022
2. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022
3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022
4. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022

D. Manfaat Penelitian

Diperkirakan bahwa penelitian ini akan memiliki aplikasi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritik : Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para akademisi dan bisa menambah referensi untuk melakukan studi tambahan tentang topik ini.
2. Manfaat Praktis : temuan studi ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai lembaga pemerintahan Daerah terhadap I-HDI

E. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan sistematika pembahasan dibuat secara berurutan, penulis menyajikan gambaran umum tentang penelitian ini dalam mempermudah penyusunan tesis. Sistematika pembahasan meliputi:

Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, formulasi, tujuan, keuntungan, dan sifat metodis dari perdebatan, dibahas secara lebih rinci dalam bab pertama. Bab ini akan menawarkan ringkasan menyeluruh tentang masalah yang muncul.

Bab selanjutnya atau kedua mendeskripsikan sektor landasan teori, telaah Pustaka atau tinjauan literatur komprehensif, menyajikan kerangka teori, dan hipotesis. Bagian ini pertama-tama mengklarifikasi hubungan mendasar antara variabel dan kemudian menunjukkan bagaimana kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada subjek penelitian. Selanjutnya, perumusan dugaan dan kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan penulis.

Bab ketiga memaparkan metodologi penelitian yang digunakan, bersama dengan demografi, sampel, metodologi, jenis studi, dan alat analisis yang dimanfaatkan untuk analisis data. Untuk generalisasi abstrak dari prasangka, penting untuk menggunakan pendekatan 10 pengambilan sampel yang sesuai dan secara akurat mencerminkan fenomena populasi yang mendasarinya. Selain itu, sangat penting menggunakan alat analisis guna menentukan sejauh mana model yang kami kembangkan konsisten dengan fenomena yang terlihat dalam data.

Bab selanjutnya atau keempat mencakup temuan juga pembahasan. Bagian ini menyajikan temuan perhitungan olah data beserta analisis yang mengenai dengan temuan tersebut. Pada bagian ini juga memaparkan korelasi antara hasil statistik dan teori yang digunakan, serta hubungannya dengan keadaan riil. Bahkan selain itu, bab ini berfungsi sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dan hipotesis yang sudah peneliti sajikan.

Terakhir atau bab kelima ialah kesimpulan penelitian, termasuk temuan penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan gagasan terhadap penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menggunakan pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial sebagai variabel independen, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *islamic human development index*. dengan variabel dependen adalah *I-HDI 2018-2022*. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model yang dipilih berdasarkan hasil pengujian yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*, dan kesimpulannya antara lain sebagai berikut. Pada bagian ini, kita akan membahas rumusan masalah dan hipotesis yang dibuat pada pembahasan sebelumnya:

1. Di Kabupaten, Kota, dan Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berdampak positif namun tidak signifikan terhadap *IPM-I* dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil ini selaras dengan hipotesis yang telah disusun pada pembahasan sebelumnya.
2. Di Kabupaten Kota Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah untuk pendidikan berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap *IPM-I* dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penyelidikan ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan dalam debat sebelumnya.
3. Di Kabupaten Kota, Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah terkait fasilitas umum dan sektor industri berdampak positif dan signifikan terhadap *IPM-I* dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penelitian ini mendukung teori yang dikembangkan selama debat sebelumnya.

4. Di Kabupaten Kota, Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah terkait perlindungan sosial berdampak positif dan signifikan terhadap I-IPM dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penelitian ini mendukung teori yang dikembangkan selama debat sebelumnya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya serta dijelaskan dengan argumentasi yang mendukung dalam pembahasan ini, maka dapat disimpulkan beberapa implikasi baik di bidang akademisi dan praktisi.

Dalam bidang akademisi hasil penelitian ini berimplikasi terhadap penambahan keilmuan melalui Islamic human development index (I-HDI) pada suatu negara maupun daerah lebih khususnya Provinsi NTB periode 2018-2022, dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga mampu memberikan gambaran baru terkait I-HDI dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

Sedangkan dalam bidang praktisi penelitian ini mampu memberikan gambaran seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap I-HDI di Provinsi NTB dengan menggunakan beberapa dimensi I-HDI dengan beberapa indikator *Hifdz Dien* dengan indikator angka kriminalitas, *Hifdz Nafs* dengan indikator angka harapan hidup, *Hifdz Aqal* dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, *Hifdz Nasl* dengan indikator laju pertumbuhan penduduk, *Hifdz Maal* dengan indikator pengeluaran perkapita dan indeks kedalaman kemiskinan dalam kurung waktu 2018-2022. Dalam hasil penelitian ini

mampu menjadi bukti otentik terhadap beberapa indikator yang harus ada perhatian khusus dari lembaga pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam meningkatkan I-HDI.

C. Keterbatasan Penelitian

Dengan kerendahan hati dan harapan untuk studi di masa depan, peneliti mengacu pada kesimpulan penelitian dan mengakui bahwa masih ada banyak kekurangan dan batasan. Beberapa kelemahan penelitian ini meliputi:

1. Adanya data pengeluaran pemerintah pada tahun 2023 di Kabupaten Kota Provinsi NTB yang belum di publis sehingga peneliti mengambil sampel penelitian sampai pada tahun 2022.
2. Alih-alih menggunakan sebelas pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, peneliti menggunakan empat variabel independen fungsi pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini: pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial, perumahan, fasilitas, pendidikan, dan kesehatan. sehingga tidak menemukan 11 fungsi pengeluaran pemerintah manakah yang sangat mempengaruhi dan tidak terhadap Islamic Human Development Index.
3. Peneliti hanya menggunakan beberapa indikator dari 5 dimensi terkait dengan I-HDI.

D. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penelitian ini yang dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan penelitian di masa depan:

1. Perlunya menambahkan beberapa variabel independen seperti variabel pengeluaran pemerintah dalam sektor ekonomi, pelayanan umum dll.
2. Perlunya menambahkan beberapa indikator dalam 5 dimensi dalam maqosid syariah seperti jumlah tempat ibadah dan lain sebagainya.
3. Pemerintah harus merancang struktur baru yang memungkinkan alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

D AFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki & Nano Prawoto. (2015). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS)*. Raja Grafindo Persada.
- Ajija, S. R. et al. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS (Empat)*. Jakarta : Salemba.
- Al Awwa, M. S. (2006). *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri'at al-Mu'asirah*. al-Maqasid Research Center.
- Alya Dwi Pujianti, Siti Fatimah, S. S. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 167–178.
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Dengan IPM Tinggi, Sedang, Dan Rendah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Asep Nurhalim, Mawarni, L., & Resfa Fitri. (2022). Pengaruh Zakat dan Islamic Human Development Index terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020. *Al-Muzara'Ah*, 10(2), 185–196. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Auda, J. (2019). Systems as Philosophy and Methodology for Analysis. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–55.
- Aulia, G. R. N., Akung Daeng, & Siti Fatimah. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kota Mataram Tahun 2012-2021. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.548>
- Aviyati, S. (2016). Analisis Pengaruh Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Iqtishoduna*, 10(2), 120–128. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3585>
- Ayu Wandirah, J. S. (2024). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(1), 61–77. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105859>
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Edaj*, 2(3), 85–98.

- Bappenas. (2014). *Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945*.
- Baso Iping. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*. 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HdI) di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 118–132. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198>
- Davies, A. and G. Quinlivan. (2006). “A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development. *Journal of Socioeconomics*, 25.
- Edi Suharto. (2008). *Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Farida Maria. 2001. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Bandung: Alfabeta. Farida Maria. 2001. Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Fadila, D., Ghofur, R. A., & Devi, Y. (2022). *Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Fahmi, D. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, dan PDRB Perkapita terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2).
- Faisol, M. (2017). Pendekatan Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh PostPostmodernisme. *Kalam*, 6(1), 39.
- Fajar, M. A. (2020). *Pengaruh Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur) The Influence Of Education Expenditure , Health Expenditure And Housing A*. 1(1), 108–118.
- Fajrin, F. I., & Erisniwati, A. (2021). Kepatuhan Konsumsi Tablet Zat Besi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil *Compliance with the Consumption of Iron Tablets Based on The Level of Knowledge of Pregnant Women*. 12, 173–179.
- Fathur, M., Zuhada, R., & Dharma, B. (2023). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah Al Ghazali Di Provinsi Sumatera Utara. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 544–554.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. UNDIP.

- Ghozali, I. dan R. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta, Salemba.
- Gujarati, D. N. & D. C. P. (2009). “*Basic Econometrics*” (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hadinata, E., Valeriani, D., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sorot*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.43-53>
- Halim, A., Rahayu, D., & Muzdalifah. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kab/Kota Dan 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Deepublish.
- Hasbi, M. Z. N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). A Conceptual Framework of The Islamic Human Development Index (I-HDI) and its Relationship with Maqāṣid Al-Sharī’ah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), 258–273. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.10910>
- Hatba, M. as’ad. (2023). *Pengaruh tingkat kemiskinan, penggauruan, zakat, pengeluaran pemerintah, terhadap islamic Human Devploment index (I-HDI)*.
- Hendri Anto MB. (2010). Introduction an Islamic human development Indeks (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *IRTI Journal*, 19(2).
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>
- Hidarini, R. A., Dwi, A., & Bawono, B. (2020). *Peran Belanja Pendidikan dan Belanja Perlindungan Sosial sebagai Variabel Moderating terhadap Hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris di Seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2018)*. 285–296.
- Hidayati, D. R., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan , kesehatan , pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(4), 703–710. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i4.11875>
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. CV Budi Utama.
- Ismail. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,

3(21), 19.

- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Mailassa'adah, P. (2019). *Social Protection Sectors Towards The Human Development*. 5(1), 42–48.
- Makhlani & Rama. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Jurnal Dialog*, 1, 36.
- Mankiw, N. . (2006). *Makro Ekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Mardianto, D. (2023). Analisis Determinan Islamic Human Development Index (I-Hdi) Di Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam. *Islamic Economic and Business Journal*, 5(1), 14–31. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4090>
- Marlin, et al. (2022). *Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan , Kesehatan , Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. 6, 210–224.
- Masili Lumanauw, T. (2022). *Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Toko The Effect Of Service On Customer Loyalty With Customer Satisfaction As An Intervening Variable At Mentari ' S Store Business In Sea Village , Pineleng District , Minahasa Regency*. 10(4), 44–51.
- Michael, stephen. (2008). *Pembangunan Manusia*. erlangga.
- Mogan js. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–17. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122%0A>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Muhamad Basyrul Muvid, & Miftahuuddin. (2022). Pendidikan Islam dan Indeks Pembangunan Manusia (Telaah atas Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Pengembangan IPM). *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 31–46. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2604>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory* (5th ed.). McGraw Hill Inc.
- Notoadmojo. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. PT Rineka Cipta.
- Novitasari, N. I., Suharno, S., & Arintoko, A. (2021). Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur.

- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 239.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1310>
- Oladapo, I. A., & Ab Rahman, A. (2018). A path analysis approach on the factors of human development among Muslims in Nigeria. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9.
- Putri, & M. (2019). Determinan Islamic Human Development Index (IHDI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*.
- Putri, R. M., & Mintaroem, K. (2020). Determinan Islamic Human Development Index (Ihdi) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1410.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1410-1420>
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1061.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Ramirez, A. G. Ranis, and F. S. (1998). *Economic Growth and Human Capital*.
- Riana, A., & Khafid, M. (2022). Analysis of Government Spending on Education on the HDI. *Jejak*, 15(2), 324–335.
<https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.38263>
- Riani, W. (2004). Pembangunan Pendidikan sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat. *Mimbar : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXII(3), 278–291.
- Rukiah, Amiur Nurudin, S. S. (2019). *Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah)*. 18(2), 307–327.
- Rukiah, A. N. & S. S. (2019). Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah). *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 233–422.
- Rukiah, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 307–327. <http://www.istinbath.or.id>
- Ruzita Mohd Amin. (2015). The Integrated Development Index (I- Index) a new comprehensive approach to measuring human Development. (*ResearchGate Blomsbury Qatar Foundations Journal*, 2, 160.
- Sadeq & Abul Hasan. (2016). *Development Issues in Islam*. International Islamic University Malaysia.
- Samuelson, P. A. dan W. D. N. (1994). *Makroekonomi* (Edisi 14 (ed.)). Jakarta: Erlangga.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020).

- Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109>
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 212–221. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.17087>
- Siregar, Z. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13030>
- Sitorus, A & Arsani, A. M. (2018). Komparasi pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi Indonesia tahun 2010- 2015 : studi kasus menggunakan metode pendekatan ADB , WEF, dan UNDP. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2(1), 64–77.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. ((23rd ed.) (Ed.))*. Alfabeta.
- Supaijo, Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan , dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam:Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–22.
- Susilowati, D., & Suliswanto, M. S. W. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.89-106>
- Tiara, R. dan. (2018). Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta tahun 2015-2016 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Tesis. UII Yogyakarta*.
- Todaro, M.P., dan Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. (9th ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Wahyuni, A., & B, S. A. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i1.14418>
- Wardhana, A. (2020). *Angka Harapan Hidup Di Era Desentralisasi Kabupaten Kota Jawa Barat*. 5, 405–422.
- Wibowo, M. G. (2019). Quality of Human Development Index (Hdi) in Muslim Countries (Case Study of Oic Members). *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*

Islam), 4(1), 1. <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i1.204>

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. (Edisi keem). Yogyakarta: Ekonesia FE UII.

Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>

Yusi, S dan Idris, S. (2020). *Statistika untuk Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. 2020.

Zouhar, Y., Jellema, J. Lustig, N., & Trabelsi0, M. (2021). *Public Expenditure and Inclusive Growth – A Survey*.